

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IUIPHH
KOP SURAT

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan (IUIPHHK/IUIPHHBK)*

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

di - Pontianak

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Kayu/Bukan Kayu)*, dengan data sebagai berikut:

1. Nama Pemohon/Perusahaan :.....
2. Alamat Pemohon/Kantor :.....
3. NIK Penganggung Jawab Usaha/
Badan Usaha :.....
4. Lokasi Pabrik :.....
Dalam Kawasan Industri :Ya / Tidak / Belum Ditetapkan*
5. Tujuan Produksi:
 - a. Mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan
 - b. Mengolah kayu olahan menjadi kayu olahan lain
 - c. Mengolah HHBK menjadi
6. Jenis produk, ragam produk dan kapasitas produksi:

No	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Produksi per Tahun	Satuan#

1.
2.

Satuan untuk HHBK mengikuti standar yang berlaku

7. Status Penanaman Modal: PMA/PMDN/Non PMA-PMDN*
8. Nilai Investasi : Rp. (.....) **)
(Untuk IPHHBK diluar tanah dan bangunan)
9. Penyerapan Tenaga Kerja : Laki-laki : Perempuan :
10. Sumber bahan baku :
11. Sebagai bahan kelengkapan permohonan terlampir kami sampaikan Dokumen Proposal Teknis beserta dokumen pendukungnya.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

.....,
Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermeterai Rp. 6.000,00

(.....)

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari*;
2. Gubernur ... ;
3. Bupati/Walikota ... *;
4. Kepala Dinas Provinsi ...*;
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah ...

*) Coret yang tidak perlu dan/atau sesuaikan dengan kewenangannya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

CONTOH FORMAT/SISTEMATIKA PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN USAHA
IPHHK

JUDUL

Kata Pengantar

Daftar Isian

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

(berisi uraian yang melatarbelakangi diajukannya izin usaha industri primer hasil hutan ditinjau dari aspek peluang pasar, proses produksi dan ketersediaan/potensi bahan baku)

B. Dasar Hukum

(dasar hukum badan usaha/pendirian badan usaha dan legalitasnya, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kegiatan berusaha dibidang industri primer hasil hutan)

C. Maksud dan Tujuan

(berisi uraian maksud dan tujuan didirikannya industri primer hasil hutan)

BAB II. Rencana Usaha

A. Identitas Perusahaan dan Penanggungjawab Perusahaan

(Sekurang-kurangnya berisi Nama Perusahaan/Badan Usaha, NIK untuk perorangan, Akta Pendirian dan Perubahannya untuk non perorangan, Direksi/Komisaris/Penanggungjawab Usaha, NIK Penanggungjawab Usaha, Alamat Kantor usaha/badan usaha, nomor kontak usaha/badan usaha, Alamat Pabrik dan Titik Koordinat, NPWP)

B. Rencana Kegiatan/Usaha

1. Jenis Industri, Ragam Produk, dan Kapasitas Izin Produksi

No.	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Produksi per Tahun	Satuan
-----	----------------	--------------	------------------------------	--------

1
2
dst				

2. Rencana Investasi

(rencana investasi dalam rupiah diperinci tanah; bangunan, alat dan mesin; modal kerja dapat terdiri dari bahan baku, upah dan lainnya; dan modal yang dapat terdiri dari modal sendiri dan pinjaman. Untuk IPHH penggergajian kayu kapasitas produksi sampai dengan 2.000 meter kubik per tahun dan arang kayu kapasitas produksi sampai dengan 2.000 meter kubik per tahun diluar tanah dan bangunan)

3. Rencana Penggunaan Mesin Utama Produksi

No.	Jenis Mesin Utama	Spesifikasi dan Pembuatan	Teknis Tahun	Kapasitas Produksi/Jam (m ³ per jam)	Frekuensi Shif Kerja Dalam Satu Hari	Waktu Hari Kerja Efektif Dalam Satu Bulan
1.	Mesin Utama 1
2.	Mesin Utama 2
3.	Mesin Lainnya

Spesifikasi teknis misalnya : untuk jenis bandsaw spesifikasinya ukuran diameter roda pemutar pita gergaji 36 inch, untuk jenis rotary dengan spesifikasi 9 feet, dll

4. Rencana Pemenuhan Kebutuhan bahan Baku dan Penggunaan Sumber Bahan Baku

a) Bahan Baku Kayu Bulat

No.	Nama Perusahaan/ Pemilik Sumber Bahan Baku	Jenis Perizinan Perusahaan/Pemilik Sumber Bahan Baku	Rencana Volume Pasokan bahan Baku	Dokumen Kerjasama dengan Sumber Bahan Baku	Dokumen terkait dengan Sumber Bahan Baku #
Tahun ke 1					
1					
2					
dst					
Tahun ke 2					
1					
2					

dst					
Tahun ke 3					
1					
2					
dst					
Tahun ke 4					
1					
2					
dst					
Tahun ke 5					
1					
2					
dst					

Ket : Sumber bahan baku yang sah sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri ini.

dokumen terkait seperti RKU/RKT dll apabila ada.

dalam hal menggunakan bahan baku hutan hak/hutan rakyat/perkebunan rakyat, kolom pemilik sumber bahan baku dapat diisi dengan nama lokasi/kabupaten asal sumber bahan baku.

b) Bahan Baku Kayu Olahan Setengah Jadi

No.	Nama Perusahaan/ Pemilik Sumber Bahan Baku	Jenis Perizinan Perusahaan/Pemilik Sumber Bahan Baku	Rencana Volume Pasokan bahan Baku	Dokumen Kerjasama dengan Sumber Bahan Baku	Jenis Kayu Olahan Setengah Jadi #
Tahun ke 1					
1					
2					
dst					
Tahun ke 2					
1					
2					
dst					
Tahun ke 3					
1					
2					
dst					
Tahun ke 4					
1					
2					
dst					
Tahun ke 5					

1					
2					
dst					

bahan baku kayu olahan setengah jadi dapat berupa kayu gergajian, veneer.

5. Rencana Penggunaan atau Pemasaran Produk Olahan

No.	Ragam Produk	Rencana Penggunaan/Pemasaran Produk Olahan				
		Untuk outsourcing Bahan Baku IPHH Group Sendiri (%)	Untuk Bahan Baku Industri lanjutan Milik Sendiri (%)	Dijual Dalam Negeri (%)	Dijual Ekspor (%)	Produk dan Kapasitas Industri Group/Industri Lanjutan Milik Sendiri
1						
2						
dst						

6. Rencana Penggunaan/Penyerapan Tenaga Kerja

No.	Tenaga Kerja Indonesia			Tenaga Kerja Asing			Keterangan
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jabatan / Keahlian	Negara Asal	Jumlah	
1							
2							
dst							

7. Rencana Penggunaan Tenaga Teknis (GANIS) PHPL

No.	Kompetensi GANIS PHPL	Jumlah	Tahun Pelaksanaan	Keterangan
1				
2				
dst				

8. Dokumen Lingkungan Yang harus Dipenuhi

(Izin Lingkungan/Perubahan izin Lingkungan/SPPL)*

BAB III. Penutup

.....

*Ket : * coret yang tidak perlu*

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA